

Gubernur Sultra Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-79, Serukan Sinergi Jaga Keamanan Daerah

Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program

makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana Siap Jadi Tuan Rumah Porprov, Bupati Tekankan Sinergi

dan Pembinaan Atlet

Bombana, sultranet.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin, 30 Juni 2025, di Hotel Grand Lampusui. Raker yang berlangsung penuh semangat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan olahraga di Bombana, baik dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga penguatan kelembagaan olahraga di berbagai tingkatan.

“Olahraga adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kita harus menjadikannya sebagai wahana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kebanggaan daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan para peserta rapat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengurus KONI, dan seluruh cabang olahraga untuk mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, langkah awal menuju Porprov 2026 harus dimulai dari perencanaan matang yang melibatkan semua pihak.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, Sekretaris KONI Sulawesi Tenggara Elvis Basri Uno, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Hendra Alimin, Ketua KONI Kabupaten Bombana Arsyad, jajaran pengurus KONI, kepala perangkat daerah terkait, serta perwakilan dari berbagai cabang olahraga.

Agenda utama Raker mencakup evaluasi program kerja tahun sebelumnya, pembahasan rencana strategis KONI Bombana tahun 2025-2026, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov 2026. Selain itu, juga dibahas optimalisasi pembinaan atlet muda melalui kompetisi-kompetisi daerah yang berkelanjutan.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Arsyad, dalam laporannya mengungkapkan

sejumlah capaian positif selama satu tahun terakhir. Beberapa atlet Bombana berhasil mengukir prestasi membanggakan di ajang kejuaraan daerah. Ia pun mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilai sangat peduli terhadap pembinaan olahraga.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan nyata selama ini. Ini menjadi motivasi kami untuk terus bekerja keras demi kejayaan olahraga Bombana,” ujar Arsyad.

Sementara itu, Sekretaris KONI Sultra, Elvis Basri Uno, menyatakan bahwa KONI provinsi siap mendukung Bombana sebagai calon tuan rumah Porprov. Ia menyebutkan bahwa tim KONI Sultra tengah menyiapkan dokumen bidding untuk dikirimkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Bombana.

“Kami akan segera melakukan proses surat-menyurat resmi untuk mendukung Bombana dalam bidding tuan rumah Porprov. Kita berharap segala proses ini berjalan lancar,” ucap Elvis.

Pihak provinsi juga menyampaikan harapan agar KONI Bombana semakin solid dan inovatif dalam membina para atlet dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai sebagai tuan rumah Porprov nantinya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga serta menyatukan visi dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif dan berdaya saing di Kabupaten Bombana.

Melalui Raker tahunan ini, KONI Bombana diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu memetakan potensi atletik lokal secara lebih menyeluruh untuk didorong ke arah pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur.

Penutupan rapat dilakukan dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjadikan olahraga sebagai pilar penting pembangunan daerah, sekaligus sebagai wahana pembentukan generasi muda Bombana yang sehat, tangguh, dan berprestasi.

Polri untuk Masyarakat, Bupati Bombana Apresiasi Peran Bhayangkara

Bombana, sultranet.com - Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kabupaten Bombana menjadi ajang refleksi sekaligus penegasan sinergi antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Upacara yang digelar di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, Selasa (1/7/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dengan mengangkat tema “Polri Untuk Masyarakat”.

Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI, Polri, dan OPD lingkup Pemkab Bombana. Sebelum prosesi utama dimulai, Kapolres Bombana bersama Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemeriksaan barisan pasukan sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar-lembaga.

Dalam sambutannya, Kapolres Wisnu Hadi menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kinerja dan eksistensi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Hari Bhayangkara ini menjadi pengingat bahwa Polri ada untuk masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah pondasi utama pembangunan, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan,” ujar Kapolres Wisnu.

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan keamanan di era modern semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan humanis, profesionalisme dalam penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Polri dalam menjalankan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si

menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kontribusi nyata jajaran Polres Bombana dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Polri adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami sangat menghargai komitmen dan keberanian aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia menambahkan bahwa keamanan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi hadirnya rasa keadilan dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, Pemkab Bombana akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial. Pemerintah daerah siap mendukung penuh upaya Polres Bombana untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan sejahtera,” imbuhnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ini juga menjadi refleksi bagi seluruh elemen daerah, bahwa keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga.

Kolaborasi yang sudah berjalan baik antara Polri dan Pemkab Bombana di berbagai sektor — mulai dari penanganan konflik sosial, pengamanan agenda-agenda pemerintahan, hingga program pembinaan masyarakat — diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Di akhir rangkaian upacara, para pejabat daerah dan unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat kepada personel Polres Bombana serta memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah dalam situasi yang cukup dinamis beberapa tahun terakhir.

Semangat Hari Bhayangkara ke-79 menjadi pengingat pentingnya solidaritas antar lembaga dan komitmen bersama dalam menjaga wilayah Bombana agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat,” peringatan ini menegaskan kembali posisi Polri sebagai pelayan publik yang terus berbenah untuk hadir lebih dekat, lebih responsif, dan lebih humanis.

Peringatan Harganas ke-32, DPPKB Bombana Kukuhkan Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas dan Tangguh Hadapi Tantangan Zaman

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyelenggarakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan semarak dan penuh makna di halaman Kantor DPPKB, Senin, 30 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan generasi bangsa yang unggul. Peringatan ini mengangkat tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, yang mencerminkan betapa strategisnya posisi keluarga dalam sistem pembangunan nasional.

Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran Dinas PPKB Bombana, termasuk Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB) PNS dan P3K se-Kabupaten Bombana, serta para Duta Genre Kabupaten Bombana tahun 2020 dan 2024. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa ketahanan keluarga harus menjadi orientasi kebijakan dan program pembangunan daerah karena keluarga adalah unit terkecil namun paling strategis dalam membentuk karakter masyarakat dan menentukan arah masa depan bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program-program strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikenal dengan istilah “Quick Win”, yakni program unggulan seperti GENTING (Gerakan

Pencegahan Stunting Terintegrasi), TAMASYA (Tanamkan Masa Depan Anak Sejak Dini), GATI (Gerakan Ayah Terlibat), SIDAYA (Sistem Informasi Keluarga Berbasis Data), hingga aplikasi SuperApps Keluarga yang terintegrasi dalam pelayanan keluarga di era digital. Ahmad Yani menyatakan bahwa semua program tersebut memiliki tujuan besar: menjadikan keluarga Indonesia, termasuk di Bombana, sebagai keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani, mandiri secara ekonomi, serta mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan jajaran OPD terkait untuk menjadikan peringatan Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi titik refleksi kolektif sejauh mana nilai-nilai pembangunan keluarga telah diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi keluarga semakin kompleks, mulai dari tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, meningkatnya kasus stunting, hingga persoalan ekonomi rumah tangga akibat ketimpangan dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersatu dalam menyikapi isu-isu tersebut secara strategis dan solutif.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam acara tersebut, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh penyuluh KB dan Duta Genre yang terus membumikan nilai-nilai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa PKK siap mendukung penuh program-program DPPKB, terutama dalam pemberdayaan perempuan, edukasi remaja, dan penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Menurutnya, keluarga bukan hanya tempat tinggal, melainkan sekolah pertama yang membentuk watak dan peradaban suatu bangsa.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan Harganas tahun ini bukan hanya dirancang sebagai acara seremonial belaka, melainkan sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terhadap program-program kependudukan dan pembangunan keluarga yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana. Ia menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, DPPKB telah berupaya memaksimalkan pendekatan berbasis keluarga sebagai strategi utama pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) telah dijalankan dan terus dikembangkan agar relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Abdul Azis menambahkan bahwa DPPKB juga berkomitmen mendukung program nasional penurunan angka stunting melalui pendekatan multisektor. Ia menyebutkan bahwa data keluarga by name by address telah menjadi fondasi penting dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian edukasi gizi kepada keluarga berisiko stunting. DPPKB juga telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan TP PKK dalam berbagai kegiatan terpadu di tingkat kecamatan dan desa.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, DPPKB Bombana juga memberikan penghargaan kepada sejumlah keluarga teladan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip keluarga berkualitas, seperti pola asuh yang sehat, pendidikan anak yang optimal, serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Pemberian cenderamata kepada keluarga teladan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung program keluarga berencana, sekaligus sebagai inspirasi bagi keluarga lainnya di Bombana agar terus memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Kepala DPPKB menyampaikan bahwa keluarga yang kuat akan menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, penyimpangan perilaku remaja, hingga tindak kriminalitas.

Selama kegiatan berlangsung, para Duta Genre Bombana turut serta menyemarakkan acara dengan menghadirkan testimoni, pertunjukan seni, serta kampanye edukatif seputar pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pendidikan seksual yang sehat, dan penghindaran pernikahan dini. Kehadiran mereka menjadi simbol keterlibatan generasi muda dalam agenda pembangunan keluarga. Duta Genre 2024 dalam orasinya menyampaikan bahwa remaja saat ini tidak boleh apatis terhadap isu-isu keluarga karena merekalah calon ayah dan ibu masa depan. Menurutnya, menjadi remaja yang berkualitas adalah langkah awal membentuk keluarga berkualitas.

Peringatan Harganas ke-32 di Bombana juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh penyuluh KB yang tersebar di setiap kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, para penyuluh menyampaikan progres kegiatan di wilayah kerja masing-

masing dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Mereka juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah, antara lain penguatan kapasitas kader, penyediaan sarana penyuluhan digital, dan dukungan logistik yang memadai. Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati menyatakan akan terus memperhatikan kebutuhan penyuluh sebagai ujung tombak pelayanan keluarga berencana di lapangan.

Kegiatan peringatan Harganas ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara DPPKB, TP PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta perwakilan masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap penguatan program pembangunan keluarga di Kabupaten Bombana. Komitmen tersebut mencakup percepatan penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan usia anak, penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta digitalisasi layanan keluarga.

Secara keseluruhan, Harganas ke-32 di Bombana menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki semangat yang sama dalam membangun keluarga sebagai pusat pembentukan karakter bangsa. Keluarga bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat belajar, bertumbuh, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta budaya luhur. Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, keluarga harus dibekali dengan keterampilan adaptasi, komunikasi yang sehat, serta akses terhadap layanan yang memadai.

Melalui momen ini, DPPKB Bombana menyatakan bahwa program-program pembangunan keluarga tidak akan berhenti pada peringatan Harganas, tetapi akan terus dikembangkan sesuai dinamika zaman. Strategi integratif akan diperkuat, peran komunitas akan diperluas, dan partisipasi remaja akan semakin didorong sebagai elemen penting dalam membangun keluarga Indonesia yang maju. Dengan semangat “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, Kabupaten Bombana ingin menjadi contoh bagaimana kekuatan sebuah bangsa sesungguhnya berawal dari kekuatan keluarga yang sederhana, harmonis, dan berkualitas.

Pemkab Kolaka Utara Serahkan Tiga Dokumen Strategis ke DPRD

KOLAKA UTARA, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyerahkan tiga dokumen strategis kepada DPRD dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (30/6). Tiga dokumen tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta Ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Multiguna.

Penyerahan ini menjadi langkah penting Pemkab Kolaka Utara dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, menegaskan bahwa sidang paripurna ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.

“Sidang ini memiliki makna strategis karena menjadi forum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas serta menyerahkan tiga dokumen penting yang akan menjadi arah dan pijakan pembangunan ke depan,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Bupati menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari kerja keras melayani masyarakat.

“Realisasi APBD 2024 alhamdulillah telah mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Mulai dari peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur yang inklusif, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, hingga pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, laporan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Namun demikian, kami menyadari masih banyak ruang perbaikan. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap dialog dan koreksi dari DPRD sebagai mitra pembangunan,” kata Bupati.

Untuk Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, Pemkab Kolaka Utara menyusunnya secara teknokratik, partisipatif, dan politis, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dokumen ini lahir dari proses yang matang dan inklusif. Kami hadirkan visi Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan agar dokumen ini mampu mengakomodasi harapan masyarakat dan mencerminkan cita-cita pembangunan yang adil dan terarah,” ucapnya.

Sementara itu, Ranperda tentang Pembentukan Perumda Multiguna diusulkan sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

“Melalui Perumda Multiguna ini, pemerintah ingin membangun holding bisnis daerah yang akan bergerak di berbagai sektor strategis seperti logistik, pangan, jasa, dan energi. Harapannya, Perumda ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta membangun kemitraan produktif dengan masyarakat,” jelas Bupati.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak DPRD untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pembahasan ketiga dokumen ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berdampak luas.

“Ini adalah fondasi masa depan Kolaka Utara. Kita ingin seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan manfaat yang nyata bagi rakyat,” tegas Bupati.

Sidang paripurna DPRD Kolaka Utara yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan dewan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, serta anggota legislatif. Suasana sidang mencerminkan semangat kolaboratif dalam mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sosialisasi Kanker di Kodim 1431/Bombana, Edukasi Kesehatan untuk Prajurit dan Keluarga

Bombana, Sultranet.com - Kodim 1431/Bombana menggelar kegiatan sosialisasi kanker dan tumor bagi Personel dan Persit di Makodim, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Senin (30/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula serba Guna Makodim ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dan menghadirkan dua pemateri, yakni Marlina, S.Kep., Ns. dan Iwan Sanusi, seorang konsultan kesehatan.

Kegiatan dibuka oleh Kapten Cba Heri Iswanto selaku Pasilog Kodim 1431/Bombana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya pemahaman tentang penyakit kanker, terutama bagi prajurit dan keluarga yang kerap abai terhadap gejala-gejala dini.

“Sosialisasi ini bukan hanya edukatif, tapi juga bentuk perhatian kita terhadap kesehatan keluarga besar Kodim,” ujarnya.

Materi pertama disampaikan oleh Marlina, S.Kep., Ns., yang memaparkan secara rinci tentang kanker prostat, serviks, endometrium, hingga kanker ovarium. Ia menyebutkan bahwa kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan, gaya hidup, dan faktor pekerjaan, sangat memengaruhi risiko terkena kanker.

“Kanker prostat misalnya, rentan terjadi pada pria yang terlalu lama duduk atau sering menahan hasrat biologis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marlina menjelaskan bahwa wanita yang menikah dini, tidak menjaga kebersihan organ reproduksi, atau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang juga memiliki risiko tinggi terkena kanker rahim.

“Gejala awal seringkali tidak terasa, seperti keputihan berlebih atau nyeri di bagian bawah perut. Deteksi dini sangat penting,” tambahnya.



Kanker payudara juga menjadi sorotan. Marlina menegaskan bahwa tidak hanya wanita, pria pun bisa terkena kanker ini. Ia mengingatkan peserta untuk mewaspadaikan tanda-tanda seperti benjolan di payudara, kulit mengeras, atau keluarnya cairan dari puting. “Pemeriksaan mandiri dengan metode SADARI dan mamografi rutin sangat dianjurkan,” ucapnya.

Sementara itu, Iwan Sanusi menambahkan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan dari luar dan dalam tubuh. Dari luar melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan konsumsi makanan berserat. Dari dalam, melalui imunisasi dan konsumsi herbal alami seperti temu putih yang mengandung ribosome inactivating protein (RIP). “RIP memiliki khasiat anti kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh,” jelas Iwan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat Kodim, di antaranya Kapten Inf Syafaraudin (Danramil [1431-01/Rumbia](#)), Kapten Inf Dahlan (Danramil

[1431-03/Poleang](#)), Lettu Inf Nyoman Admika (Danunit Intel), serta anggota Persit Cabang LXIV Bombana. Mereka tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi terbuka seputar kanker.



Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, yang dikonfirmasi usai kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. “Ini bentuk perhatian kami terhadap kesehatan prajurit dan keluarganya. Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh peserta lebih peduli terhadap gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Dandim.

Ia juga berharap edukasi ini bisa diteruskan hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. “Kami ingin menciptakan budaya hidup sehat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga prajurit,” tambahnya.

Dengan semangat edukasi dan pencegahan, kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan peserta mengenai bahaya kanker dan pentingnya deteksi dini, sebagai langkah awal perlindungan terhadap penyakit mematikan tersebut. (Pen)

Keluarga Kuat Dorong Indonesia Emas 2045, Gubernur Sultra Pimpin Harganas ke-32

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan tema “*Dari Keluarga untuk Indonesia Maju*” di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Acara dihadiri ribuan ASN, Forkopimda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala OPD.

Upacara ini menggambarkan posisi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur membacakan sambutan Menteri BKKBN, Wihaji, yang menegaskan peran keluarga dalam mempersiapkan generasi berkualitas, berakhlak dan kompetitif.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” tegas Gubernur.

Pemerintah fokus pada tiga pilar utama untuk membentuk keluarga berkualitas: pendidikan dan literasi digital, kesehatan keluarga terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting, serta peningkatan ekonomi keluarga termasuk perlindungan lansia.

Gubernur menyoroti dampak negatif penggunaan gawai dalam keluarga yang menggantikan interaksi dan menekankan perlunya manajemen digital yang seimbang. Kesehatan keluarga mendapat penekanan khusus melalui pencegahan stunting dan layanan kesehatan berkelanjutan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan agar rumah tangga memiliki penghasilan layak serta produktivitas tetap terjaga, termasuk untuk lansia.

Upaya ini didukung regulasi dan program nasional BKKBN berupa *Quick Win*, meliputi:

1. **GENTING** - Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
2. **TAMASYA** - Taman Asuh Sayang Anak sebagai penitipan anak berstandar
3. **GATI** - Gerakan Ayah Teladan Indonesia mendorong peran ayah dalam pengasuhan
4. **SIDAYA** - Lansia Berdaya, menjaga kemandirian lansia
5. **SuperApps Keluarga** - platform digital terpadu untuk layanan keluarga

Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, lembaga sosial—untuk bersinergi memperkuat institusi keluarga. Menurutnya, akarnya ada di dalam rumah, dan dari sanalah lahir nilai-nilai karakter bangsa.

“Selamat memperingati Harganas ke-32. Mari jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.

Upacara Harganas ini menjadi momentum mengingatkan bahwa kekuatan bangsa dimulai dari keluarga. Dengan pondasi kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, keluarga menjadi ujung tombak pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kemendagri Minta Daerah Serius Kendalikan Inflasi, Sultra Catat Kenaikan IPH 1,43 Persen

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom

Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menjangkau seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsy Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia

menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Toms. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Toms, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejala harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.

Gubernur Sultra: Keluarga Adalah Kunci Indonesia Maju

Kendari, sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 30 Juni 2025.

Upacara yang mengusung tema nasional “*Dari Keluarga untuk Indonesia Maju*” ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital keluarga dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam menyongsong Indonesia Emas

2045. Ribuan peserta dari jajaran Pemprov Sultra, mulai dari ASN, Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan lembaga daerah turut hadir menunjukkan dukungan terhadap komitmen pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka membacakan pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, yang menekankan pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi bangsa.

“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan. Tiga fokus utama diarahkan demi mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, termasuk literasi digital agar teknologi tidak menggerus komunikasi antarkeluarga. Kedua, peningkatan kesehatan keluarga, terutama perhatian pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Ketiga, penguatan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga mandiri secara finansial, termasuk keberpihakan kepada para lansia.

“Kalau keluarga kuat, negara pasti kuat. Dan itu harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seimbang dalam keluarga,” tambah Gubernur.

Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjalankan lima program unggulan yang disebut *Quick Win*. Pertama, *Genting* atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mengajak masyarakat bergotong royong membantu keluarga berisiko. Kedua, *Tamasya* atau Taman Asuh Sayang Anak, tempat penitipan anak yang aman dan terstandar, sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan orang tua bekerja.

Ketiga, *Gati* atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter. Keempat, *Sidaya* atau Lansia Berdaya, program pendampingan lansia agar tetap produktif dan mandiri. Kelima, *SuperApps Keluarga*, aplikasi digital terpadu yang menyediakan data, layanan, dan konsultasi keluarga secara online.

Gubernur Sultra dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk

bergandengan tangan membangun keluarga berkualitas demi menciptakan bangsa yang sejahtera. Menurutnya, penguatan institusi keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis dan tangguh, kita bisa wujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tuturnya.

Harganas ke-32 di Sultra tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momen introspeksi bersama untuk kembali memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam menghadapi tantangan zaman. Upacara tersebut menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa membangun bangsa harus dimulai dari rumah.

Pemkab Bombana Sukses Naikkan Capaian Tindak Lanjut Temuan BPK

Upaya Perbaikan tata kelola keuangan dan akuntabilitas daerah

Bombana - sultranet.com - Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan kemajuan. Dari tahun ke tahun, angka penyelesaian rekomendasi terus bergerak naik, menandakan adanya kesungguhan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada 23-26 Juni 2025 lalu, Pemkab Bombana mencatat capaian sebesar **82,93 persen**, atau sebanyak **69 rekomendasi telah ditindaklanjuti**. Angka ini meningkat dibanding semester sebelumnya yang berada di angka 81,56 persen.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Aula BPK Sultra dan dihadiri oleh perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, hadir Plh. Sekda Bombana dr. H. Sunandar A. Rahim, MM.Kes, Inspektur Daerah Ridwan, S.Sos., M.P.W, serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Bombana.

Dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara **Dr. Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA** menekankan pentingnya kegiatan pemantauan ini sebagai bagian dari sistem kontrol keuangan negara yang terus diperkuat.

“Kepala daerah atau yang mewakili dapat mengetahui sejauh mana progres tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian. Ini penting agar ada perhatian serius demi peningkatan akuntabilitas di masa depan,” ujar Dadek. Kamis (26/6)

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan dari hasil-hasil fisik, tetapi juga dari kualitas pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, **Ridwan**, menyampaikan bahwa peningkatan capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK secara serius.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana sungguh-sungguh menyelesaikan setiap temuan pemeriksaan, terutama dalam hal ganti rugi dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang makin tertib dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, apa yang dicapai hari ini adalah cerminan dari proses pembelajaran kolektif selama bertahun-tahun. Setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan menumbuhkan budaya transparansi.